

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi sebagian persyaratan mencapai
derajat Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Jurusan Ekonomi Islam (EI)



Oleh:

**IRA NIKMATUL MASKUROH
NIM: 122411209**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

Dr. H. Nur Fatoni M. Ag.
Gondang Rt 02/04 Cepiring Kendal

H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag.
Sawangan Elok blok BF 2 no 16 Rt 04/07
Duren mekar Bojongsari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ira Nikmatul Maskuroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

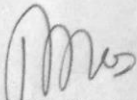
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ira Nikmatul Maskuroh
NIM : 122411209
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA
SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklumadanya dan kami ucapkan terima kasih

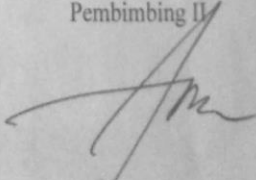
Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Semarang, 8 Mei 2019

Pembimbing II


H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH dan Hukum SEMARANG

Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngali Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ira Nikmatul Maskuroh
NIM : 122411209
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA**

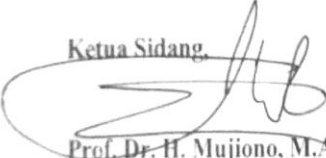
BAZNAS KOTA SEMARANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

..... Juni 2015

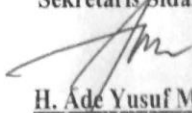
Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana
Strata1 tahun akademik 2014/2015

Ketua Sidang,


Prof. Dr. H. Mujiono, M.A
NIP. 195902151985031005

Semarang, Juni 2019


Sekretaris Sidang,


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji I,


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus, M.Ag
NIP. 195904131987032001

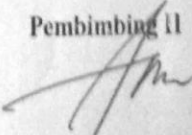
Penguji II,


Johan Arifin, H, S.Ag., M.M.H
NIP. 197109082002121001

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

MOTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبه:
60)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 260.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Edy Purnomo dan Ibu Turhayati) yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku.
- ❖ Suamiku tercinta (Tauhid) yang selalu menemaniku dalam suka, duka dan dalam menuntaskan tugas skripsi ini.
- ❖ Putriku tercinta (Aisyah Ayudia Inara) yang selalu menjadi penyemangat hidupku. Semoga menjadi anak yang solehah ya nak amin.
- ❖ Kakak dan adikku tercinta yang telah memberi semangat.
- ❖ Seluruh keluarga, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- ❖ Teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang senasib seperjuangan.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Zakat produktif dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq*. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp.

1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sepuluh bulan dalam jangka waktu satu tahun diberikan dengan cuma-cuma kepada *mustahiq* (*qardhul hasan*). Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai program pemberdayaan mustahik yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Sebagai rumusan masalah adalah bagaimana kebijakan BAZNAS untuk penyaluran zakat produktif? Bagaimana manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: pengurus atau pimpinan, manajer atau karyawan BAZNAS Kota Semarang dan beberapa mustahiq penerima zakat. Data sekunder adalah dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif sudah sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan harapan semua pihak meskipun belum sempurna karena di sana sini masih terdapat kekurangan. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen modern yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai pula dengan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata kunci: Zakat Produktif, Baznas, Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA SEMARANG**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv

HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II : MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF	
A. Pengertian Manajemen Zakat Produktif.....	24
B. Pendistribusian Zakat Secara Produktif	31
C. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif	37
D. Syarat-Syarat Zakat Produktif.....	43
BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
A. Profil BAZNAS Kota Semarang	53
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang	53
2. Visi Misi BAZNAS Kota Semarang	54
a. Visi.....	54
b. Misi	54
c. Motto.....	54
3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang	54
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang	55
5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang.....	58
6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang.....	59
B. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang	61
C. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq	

pada BAZNAS Kota Semarang	64
-BAB IV : ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA	
BAZNAS KOTA SEMARANG	
A. Analisis Kebijakan BAZNAS untuk Penyaluran Zakat	
Produktif	72
B. Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif pada	
BAZNAS Kota Semarang	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat produktif dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.² Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64.

² Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2018, h. 77.

tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³

Problem utama zakat produktif adalah sebagai berikut: 1) Penyaluran zakat produktif, kebijakannya masih terbatas karena kebutuhan konsumtif masih tinggi. 2) Penyaluran zakat produktif masih ada yang belum tepat sasaran, belum mampu secara signifikan dalam memerangi kemiskinan, dan belum mampu secara signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZNAS dalam mengelola dana umat. 3) Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah, paradigma dan mental mustahiq yang belum siap untuk diberdayakan. Akibatnya, timbul sifat ketergantungan dari mustahiq terhadap lembaga amil zakat.⁴ 4) Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu di kalangan akademisi, praktisi bahkan telah menyentuh lapisan masyarakat umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang

³ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf, Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 45

⁴ Widya Francisca Fitriani & Anita Priantina, "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.2, 2016 142 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), , h. 143

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 83-84.

seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuahkan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶

Dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat termasuk zakat produktif ditegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan (disalurkan) kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Sehubungan dengan itu, BAZNAS Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat telah dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Dari observasi sementara yang peneliti lakukan terkait penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang memperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mampu mengentaskan sejumlah mustahiq dari keterbatasan.⁷

Berdasarkan penelitian pendahuluan, peneliti memperoleh keterangan dari Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq*. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk

⁶ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 166

⁷ Observasi di BAZNAS Kota Semarang tanggal 5 Maret 2019. Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang

menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sepuluh bulan dalam jangka waktu satu tahun diberikan dengan cuma-cuma kepada *mustahiq* (*qardhul hasan*).⁸ Atas informasi tersebut peneliti tertarik mengetahui lebih dalam mengenai penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

Pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai program pemberdayaan mustahik yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut;

1. Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak. Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:⁹
 - a. Analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak. Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi calon penerima program sentra usaha ternak kambing. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua ini dimaksudkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.
 - b. Pemberian bantuan binatang ternak. Tahap kedua ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang setelah tahap survei sukses dilaksanakan. Selain itu sebagai penyempurnaan mustahik juga harus memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Kriteria tersebut adalah:
 - 1) Beragama Islam. Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini.

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) tanggal 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB

⁹ *Ibid*

- 2) Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin. Kriteria ini dimaksudkan agar setelah menerima program ini mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.
 - 3) Warga Kota Semarang. Selain warga Kota Semarang tidak berhak menerima program ini, program ini hanya untuk warga Semarang.
 - 4) Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang. Seperti yang telah dijelaskan di atas mekanisme awal dari pelaksanaan program ini adalah survei lokasi oleh BAZNAS Kota Semarang. Jadi apabila tempat yang dimaksudkan tidak sesuai dengan hasil survei, maka bantuan tidak jadi diberikan.
- c. Pembinaan. Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS kota Semarang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS kota Semarang kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahik yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.
 - d. Monitoring atau pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak mustahiq bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.
2. Mekanisme pelaksanaan program bina mitra mandiri. Bina mitra mandiri adalah program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Semarang yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS Kota Semarang sudah memberikan

bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan pinjaman program bina mitra mandiri adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
- b. BAZNAS Kota Semarang melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan
- c. BAZNAS Kota Semarang melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal
- d. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Semarang untuk mencairkan dana.

BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif telah dilakukan secara cermat untuk bantuan modal usaha, sentra ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Dengan dana zakat yang disalurkan pada tahun 2016, zakat produktif adalah sebesar Rp. 95.000.000,00, untuk 95 orang. Tahun 2017, zakat produktif adalah sebesar Rp. 100.000.000,00, untuk 100 orang. Tahun 2018, zakat produktif adalah sebesar Rp. 150.000.000,00, untuk 15 orang. Dana tersebut digunakan untuk membantu mustahiq yang membutuhkan bantuan modal.

Dalam menjalankan program Sentra Usaha Ternak saat ini BAZNAS Kota Semarang memiliki satu desa binaan yaitu di Dukuh Jamalsari Kelurahan Kedungpane yang diberikan modal sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk dibelikan hewan ternak. Pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak ini

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) tanggal 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB

diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada mustahiq yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra usaha ternak. Menurut Bapak Asyhar, program sentra usaha ternak ini menggunakan sistem *mudharabah* dengan rincian bagi hasil 70/30. Jadi ketika sudah waktunya kambing-kambing tersebut untuk dijual, maka keuntungan akan dibagi dua yang mana 70% untuk mustahiq dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.¹¹

Selain program sentra usaha ternak, BAZNAS Kota Semarang juga memiliki program bina mitra mandiri. Program ini berupa bantuan dana pinjaman modal bagi usaha-usaha kecil. Melalui program ini para peserta (mustahiq) diberikan bantuan berupa dana pinjaman modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir ini, mereka diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka dapat meningkat bahkan mereka dapat menjadi muzakki. Sosialisasi program Bina Mitra Mandiri dilakukan oleh anggota BAZNAS Kota Semarang melalui masjid-masjid, majelis taklim dan website.

Model sosialisasi seperti ini memang dipandang cukup efektif dan efisien, karena lebih memaksimalkan kinerja anggota BAZNAS Kota Semarang dalam mensosialisasikan program ini dan mudah untuk memantaunya. Program Bina Mitra Mandiri ini menggunakan akad *qardhul hasan*¹² yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada mustahik tanpa bunga dan agunan. Cara pengembaliannya adalah dengan cara diangsur sebesar 10% per bulan dari jumlah dana yang dipinjamkannya. Karena pinjaman dana dalam program ini tanpa agunan, jumlah maksimal yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- dan sangat mementingkan komitmen mustahiq untuk bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir itu. Sistem dana bergulir ini juga

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) tanggal 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB

¹² Akad *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Lihat Huruf B Angka VII.b Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs. Lihat A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, h. 222

secara tidak langsung mengajarkan mustahiq agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya, dan dana yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Semarang telah memberikan pinjaman modal bergulir kepada peserta (mustahik) sebanyak 35 orang dengan nominal yang berjumlah Rp. 33.750.000,- dan kelompok usaha sebanyak 11 kelompok dengan jumlah Rp. 105.250.000,-.

Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis termotivasi untuk mengambil tema ini dengan judul: Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Semarang.

B. Perumusan Masalah

Sebagai perumusan masalah:

1. Bagaimana kebijakan BAZNAS untuk penyaluran zakat produktif?
2. Bagaimana manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan BAZNAS untuk penyaluran zakat produktif
2. Untuk mengetahui manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam rangka pengembangan ekonomi dan bisnis Islam

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kemajuan dan kredibilitas Baznas Kota Semarang dalam manajemen penyaluran zakat produktif

D. Tinjauan Pustaka

Melalui kajian literatur dapat diketahui bahwa telah banyak buku dan penelitian yang membahas tentang zakat produktif, namun belum ada yang membahas secara integral komprehensif tentang manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang. Meskipun demikian, beberapa penelitian terdahulu sangat mendukung penelitian saat ini. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun Nuh Wahib Fauzi dengan judul: “Penyaluran Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cilacap)”. Temuan penelitian sebagai berikut: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap membuat beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti : a) memberi bantuan usaha produktif dalam bentuk modal usaha untuk kaum dhuafa faqir miskin yang membutuhkan. b) Mengadakan pelatihan-pelatihan. c) Pemantauan secara berkala dari bantuan-bantuan untuk modal-modal usaha. d) Merintis bekerjasama dengan berbagai pihak. e) Membantu pendidikan anak-anak dari fakir miskin. f) Memberdayakan ekonomi keluarga. g) Pengembangan terhadap usaha kecil. h) Membuat program pelatihan. i) merencanakan membuat Koperasi atau lembaga non stuktural. j) Merencanakan berdirinya kampung zakat atau desa zakat.

Kedua, penelitian yang disusun Muhammad Fakhri Amir dengan judul: “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)”. Temuan penelitian sebagai berikut: pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS kota Makassar dilakukan dengan dengan dua model yaitu dengan sistem *In Kind* untuk peningkatan skill *mustahiq*, dan dengan sistem *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan modal usaha *mustahiq*. Selain itu diketahui

bahwa dari pemanfaatan zakat produktif tersebut benar-benar mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*, dimana dari 37 responden, sebanyak 33 responden mengalami peningkatan pendapatan. Kemudian dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21, diketahui bahwa secara simultan jumlah zakat, pendampingan usaha, lama usaha, jenis usaha dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan *mustahiq*. Namun secara parsial, hanya tiga faktor yang memiliki pengaruh signifikan yaitu jumlah zakat, pendampingan usaha, dan lama usaha, sedangkan faktor jenis usaha dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan *mustahiq*.

Ketiga, skripsi yang disusun Fajar Eka Pratomo dengan judul: “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”. Temuan penelitian sebagai berikut: untuk efektivitas sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif karena menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dikenal, ataupun melalui orang yang mempunyai link dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah kurang maksimalnya penggunaan media masa dan juga karena BAZNAS Kabupaten Banyumas pada dasarnya tidak mempunyai kegiatan khusus untuk sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif.

Keempat, Jurnal Maftul Fitri dengan judul: “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Temuan penelitian sebagai berikut: tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (*mustahik*). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang,

selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.¹³

Kelima, skripsi yang disusun oleh Andri Setiawan dengan judul: “*Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Konsep Penyaluran/Distribusi Zakat Produktif dalam Kitab Fiqhuz Zakat*”. Temuan penelitian sebagai berikut: Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan suatu fatwa berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam, dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan. Dalam permasalahan ini Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pemerintah sangat berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat agar dana zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, dengan menunjuk secara langsung para amil zakat agar tidak terjadi kepentingan-kepentingan individu. Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa sebaiknya dana zakat didistribusikan dalam bentuk produkti dan konsumtif agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para mustahiq. Sesungguhnya format ideal dari pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia telah banyak mengadopsi konsep-konsep dasar yang dirumuskan oleh sosok ulama Yusuf al-Qardhawi. Namun demikian, sematang apapun konseptualisasi tentu akan menghadapi banyak persoalan dan hambatan dalam mengimplementasikannya pada tataran praksis. Secara umum umat Islam

¹³ Maftul Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173 ISSN: 2085-9325, h. 149.

mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.¹⁴

Penelitian-penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti susun saat ini. Penelitian terdahulu belum menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya. Penelitian saat ini menjawab tiga permasalahan yang mendasar yaitu *pertama*, bentuk-bentuk zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang; *kedua*, manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang; *ketiga*, hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif.¹⁵ Menurut Bogdan dan Taylor: "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).¹⁶ Menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka.¹⁷ Perspektif Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

¹⁴ Andri Setiawan, "Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat", Skripsi: Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015

¹⁵Ciri-ciri penelitian kualitatif, antara lain : (1). Berdasarkan keadaan alamiah, (2). Peneliti sebagai instrumen, (3). Bersifat deskriptif, (4). Lebih mementingkan proses daripada hasil, (5). Mengutamakan data langsung, (6). Data yang purposif, (7). Mengutamakan perspektif emic, (8). Menonjolkan rincian kontekstual, (9). Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012, h. 10.

¹⁶Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, h. 4.

¹⁷Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013, h. 125.

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁸

Berpijak pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif, sebagai pendekatannya adalah pendekatan normatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini yaitu Baznas Kota Semarang. Sumber data ini terbagi dalam jenis data primer, dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.¹⁹ Data yang dimaksud yaitu hasil observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: pengurus atau pimpinan, manajer atau karyawan BAZNAS Kota Semarang dan beberapa mustahiq penerima zakat. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Selain wawancara, maka peneliti menggunakan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Data yang dimaksud adalah dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 6.

¹⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, h. 134-163.

penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian..

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰ Adapun yang menjadi obyek wawancara adalah pengurus atau pimpinan, manajer atau karyawan BAZNAS Kota Semarang dan beberapa mustahiq penerima zakat.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka sadar bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, h. 127.

²¹ Imam Suparyogo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001, h. 23

harian, dan sebagainya.²² Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis meliputi semua unsur tulisan, gambar, karya, baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan, resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data, informasi dan fakta mengenai suatu peristiwa yang diteliti. Karena itu, dokumen yang dimaksud sumber pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah yang terkait dengan rekaman kejadian, proses, setting sosial mengenai peristiwa yang diteliti. Dokumen yang diteliti adalah data tentang manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang.

Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

4. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²³ Sejalan dengan itu, menurut Sugiyono uji kredibilitas (*credibility*) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member chek*.²⁴ Demikian pula menurut Moleong teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas kriteria

²² *Ibid*, h. 135.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, h. 324.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014, h. 121.

derajat kepercayaan (*credibility*) meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota.²⁵

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori.²⁶ Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif.²⁷ Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁸ Menurut Danim triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multi metode untuk menelaah fenomena yang sama.²⁹ Menurut Sugiyono dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.³⁰

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 327.

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2017, h. 256.

²⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 187.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, h. 330.

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 37.

³⁰ Sugiyono, *Memahami...*, h. 83.

itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.³¹

Triangulasi dengan "sumber" berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (d) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan; (e) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Pada triangulasi dengan "metode", terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

Triangulasi dengan "teori", menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanations*).

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, h. 330.

Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembeding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Jika peneliti membandingkan hipotesis pembeding dengan penjelasan pembeding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu. Justru peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan "bukti" yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan "utama" peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber karena triangulasi sumber merupakan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan, mudah diterapkan, praktis dan simpel.³²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis melalui penyajian data secara kualitatif, yaitu suatu pola untuk menggambarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Setelah data-data ini terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek tersebut.

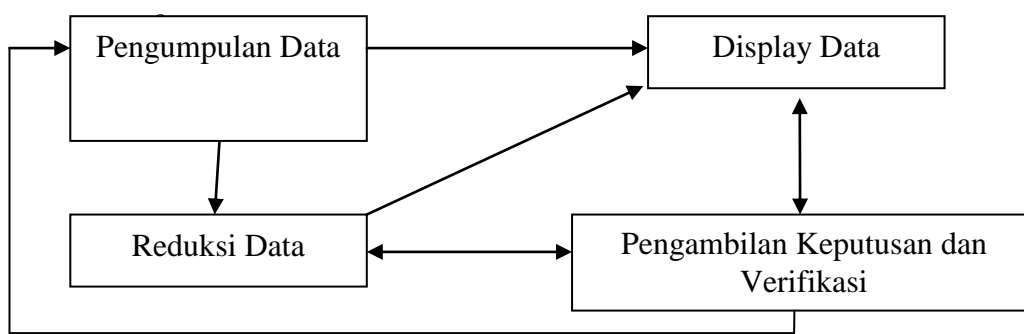
³² Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, h. 330.

³³ *Ibid.*, 3.

Atas dasar itu penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan seterusnya sampai diperoleh data yang betul-betul mantap, sehingga merupakan suatu siklus.³⁴

Siklus analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Tahap-tahap Analisis Data³⁵



Dengan demikian ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) reduksi data, (b) display data (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.³⁶

1. Reduksi Data

³⁴Menurut Noeng Muhadjir bahwa Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif positivistic dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data penelitian kuantitatif statistik, dengan menggunakan tabel, grafik, matriks, dan semacamnya; bukan diisi dengan angka-angka, melainkan dengan kata atau *phrase* verbal. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012, h. 47. Berbeda dengan Noeng Muhadjir, Burhan Bungin mengkritik pedas Miles dan Huberman, juga mengkritik Moleong yang menganggap terlalu dipengaruhi Miles dan Huberman. Lihat lebih dalam lagi dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2017, h. 149

³⁵Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Hammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 14. Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2010, h. 18.

³⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h. 86

Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka itu jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh sebab itu laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, peneliti akan berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatnya itu peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

A. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang manajemen penyaluran zakat produktif yang meliputi manajemen pengertian manajemen zakat produktif, pendistribusian zakat secara produktif, hikmah dan tujuan zakat produktif, syarat-syarat zakat produktif.

Bab III berisi deskripsi BAZNAS Kota Semarang yang meliputi Profil BAZNAS Kota Semarang (Sejarah BAZNAS Kota Semarang, visi-misi BAZNAS Kota Semarang, tujuan BAZNAS Kota Semarang, struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang, letak geografis BAZNAS Kota Semarang, program-program BAZNAS Kota Semarang). Kebijakan BAZNAS untuk penyaluran zakat, manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang.

Bab IV membahas tentang manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang yang meliputi: analisis kebijakan BAZNAS untuk penyaluran zakat produktif; analisis manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Pengertian Manajemen Zakat Produktif

Istilah “manajemen zakat produktif” terdiri dari tiga kata, “manajemen”, “zakat”, produktif.³⁷ “Istilah manajemen dalam bahasa Arab, disebut dengan dua kata yakni kata *idarah* (berkeliling atau lingkaran) dan *tadbir*. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai sebagai “bisnis berjalan pada siklusnya”.³⁸ Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19. Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah "*management*" hingga saat ini terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurusan, pengelolaan ketatalaksanaan, manajemen dan *management*.³⁹ Dalam *Kamus Ekonomi*, *management* berarti pengelolaan, kadang-kadang ketatalaksanaan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁴⁰

Secara terminologi, bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.⁴¹ Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen seperti dikemukakan George. R.Terry adalah

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan:

³⁷ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015, h.

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Produktif dan Efektif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 17.

³⁹ Harbangan Siagian, *Manajemen Suatu Pengantar*, Semarang: Satya Wacana, 2013, h. 8-9.

⁴⁰ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 708.

⁴¹ Moekiyat, *Kamus Management*, Bandung: Alumni, 1980, h. 320.

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain).⁴²

Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.⁴³

2. Menurut Harold Koontz dan Cyril O. Donnel:

*Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people*⁴⁴ (manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian).

3. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter: *Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so their activities are completed efficiently and effectively.*⁴⁵ (manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain).

4. Manajemen menurut James Stoner, dkk., adalah proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai

⁴² George.R.Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977, h. 4.

⁴³ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 9.

⁴⁴ Harold Koontz and Cyril O. Donnel, *Principles of Management, An Analysis of Managerial Functions*, Second Edition, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, Ltd, 1984, h. 3.

⁴⁵ Stephen P. Robbins and Mary Coulter, *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1992, h. 39.

usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.⁴⁶

5. Menurut Sofyan Syafri Harahap manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.⁴⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kaitannya dengan konsep manajemen Islam sebagai berikut:

1. Menurut Sofyan Syafri Harahap, manajemen Islam adalah sebagai suatu ilmu manajemen yang berisi struktur teori menyeluruh yang konsisten dan dapat dipertahankan dari segi empirisnya yang didasari pada jiwa dan prinsip-prinsip Islam.⁴⁸
2. Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹
3. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. Manajemen syari'ah membahas struktur yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian Allah. Manajemen syari'ah membahas sistem, dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku pelakunya berjalan dengan baik.⁵⁰

⁴⁶ James A.F. Stoner, dkk., *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1995, h. 10.

⁴⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 121.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 126.

⁴⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Islam dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 22.

⁵⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Islam dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 5 dan 9.

4. Menurut M. Ma'ruf Abdullah, manajemen syariah dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana dalam rangka melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang lain.⁵¹

Sejalan dengan itu, menurut Adiwarmanto A. Karim bahwa manajemen Islam harus mencakup empat hal: *pertama*, manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islami. *Kedua*, kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. *Ketiga*, faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. *Keempat*, sistem dan struktur organisasi sama pentingnya.⁵²

Adapun tentang manajemen zakat, bahwa *cakupan manajemen zakat* meliputi: perencanaan dalam penyaluran zakat, pengorganisasian dalam penyaluran zakat, penggerakan dalam penyaluran zakat, dan pengawasan dalam penyaluran zakat. Sedangkan zakat itu sendiri dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dapat ditinjau dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-nama* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.⁵³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.⁵⁴ WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.⁵⁵

⁵¹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. viii.

⁵² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 171.

⁵³ Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972, h. 396.

⁵⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 1279.

⁵⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1155.

Dalam Kamus *Idris al-Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”.⁵⁶ Dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% (dua setengah persen) dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri).⁵⁷ Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.⁵⁸

Dalam Kitab *Fath al-Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.⁵⁹ Dalam kitab *Fath al-Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁶⁰

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.⁶¹ Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.⁶²

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

⁵⁶Muhammad Idris Abd al-Ro'uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth, h. 267.

⁵⁷Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, h. 1088.

⁵⁸Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000, h. 1003.

⁵⁹Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, h. 158.

⁶⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlîbary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, h. 50.

⁶¹Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, h. 386.

⁶²Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 263.

Al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁶³ Ibrahim Muhammad al-Jamâl memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.⁶⁴ Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى للفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".⁶⁵

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.⁶⁶ Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.⁶⁷

⁶³Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 449.

⁶⁴Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 180.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 318

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

⁶⁷ Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 60)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"⁶⁸

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.⁶⁹ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Adapun manajemen zakat produktif, bahwa kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "Productivity" berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil."⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, h. 280.

⁶⁹ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976, h. 248.

⁷⁰ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015, h. 29-30.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dan kata konsumtif.⁷¹ Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu "untuk diproduktifkan", bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan *maqasid shari'ah*. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus,⁷² bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

B. Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.⁷³ Pada perencanaan terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus

⁷¹Isnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 63.

⁷²*Ibid.*, h. 64.

⁷³Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 131.

dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya? Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang.⁷⁴

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.⁷⁵

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat, ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran.

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- a. *Self-audit* (menentukan keadaan organisasi sekarang).
- b. *Survey terhadap lingkungan*
- c. Menentukan tujuan (objectives)
- d. *Forecasting* (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang)
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- f. *Evaluate* (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan)
- g. Ubah dan sesuaikan "*revise and adjust*" rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah.

⁷⁴ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, h. 948.

⁷⁵ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 163.

- h. *Communicate*, berhubungan terus selama proses perencanaan.⁷⁶

Rincian kegiatan perencanaan tersebut menggambarkan adanya persiapan dan antisipasi ke depan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Atas dasar itu maka perencanaan merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.⁷⁷

Merencanakan di sini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Dengan demikian perencanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien bila diawali dengan persiapan yang matang. Sebab dengan pemikiran secara matang dapat dipertimbangkan kegiatan prioritas dan non prioritas, Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Forecasting*

Forecasting adalah tindakan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan kejadian yang mungkin timbul dan dihadapi di masa depan berdasarkan hasil analisa terhadap data dan keterangan-keterangan yang konkrit.⁷⁸ Singkatnya *forecasting* adalah usaha untuk meramalkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa datang.⁷⁹ Perencanaan di masa datang memerlukan perkiraan dan perhitungan yang cermat sebab masa datang adalah suatu prakondisi yang

⁷⁶ Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hlm. 24,

⁷⁷ A.Rosyad Shaleh,, *Management Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 64.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

⁷⁹ George R.Terry,, dan Leslie.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 56.

belum dikenal dan penuh ketidakpastian yang selalu berubah-ubah. Dalam memikirkan perencanaan masa datang, jangan hanya hendaknya mengisi daftar keinginan belaka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam rangka *forecasting* diperlukan adanya kemampuan untuk lebih jeli di dalam memperhitungkan dan memperkirakan kondisi objektif suatu kegiatan di masa datang, terutama lingkungan yang mengitari kegiatan itu, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam kerangka *forecasting* ini, berbagai tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

1) Evaluasi keadaan

Hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan rencana yang lalu terwujud. Dari hasil telaah dan penelitian itu, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Dari situ dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan di masa datang.⁸⁰

2) Membuat Perkiraan-perkiraan

Langkah ini dilakukan berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan bertolak pada asumsi; kecenderungan masa lalu diproyeksikan pada masa yang akan datang, peristiwa yang terjadi berulang-ulang pada masa datang, menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Bertolak dari asumsi di atas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Pendekatan ekstrapolasi; yaitu perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.⁸¹
- b) Pendekatan normatif; yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku.⁸²

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 192.

⁸¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, hlm. 222.

- c) Pendekatan campuran.
- 3) Menetapkan sasaran/tujuan
- 4) Merumuskan berbagai alternatif
- 5) Memilih dan menetapkan alternatif
- 6) Menetapkan rencana
- b. Objectives

Objectives diartikan sebagai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan adalah nilai-nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai nilai-nilai itu dia bersedia memberikan pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu, terjangkau.⁸³

Penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan, dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua sesudah *forecasting*. Hal ini menjadi penting, sebab gerak langkah suatu kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi acuan pada setiap pelaksanaan kegiatan usaha.

Tujuan tersebut harus diarahkan pada sasaran suatu usaha yang telah dirumuskan secara pasti dan menjadi arah bagi segenap tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk target atau sasaran kongkrit yang diharapkan dapat dicapai.⁸⁴ Sasaran tersebut harus diperjelas secara jelas guna mengetahui kondisi sasaran yang diharapkan, wujud sasaran tersebut berbentuk individu maupun komunitas masyarakat.⁸⁵

- c. Mencari berbagai tindakan

⁸² *Ibid.*, hlm. 618.

⁸³ Robert H. Davis, *Learning System Design*, New York: McGraw-Hill, Inc, 1974, hlm. 90.

⁸⁴ Muchtarom, Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Al-Amin, 1997, hlm, 189-190.

⁸⁵ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 184 – 185.

Tindakan harus relevan dengan sasaran dan tujuan, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang bijaksana. Tindakan harus sinkron dengan masyarakat, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketidaksinkronan dalam menentukan tindakan dapat menimbulkan dampak negatif.

Oleh karena itu jika sudah ditemukan berbagai alternatif tindakan, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh, dalam arti bahwa perencana harus memberikan penilaian terhadap kemungkinan tersebut. Pada tiap-tiap kemungkinan tersebut, harus diperhitungkan untung ruginya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan.

d. Prosedur kegiatan

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan.⁸⁶

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.

e. Penjadwalan (*Schedul*)

Schedul merupakan pembagian program (alternatif pilihan) menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses kegiatan suatu usaha. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi.⁸⁷

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah ditentukan harus dapat ditepati, sebab menurut Drucker semakin banyak menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan merupakan pekerjaan profesional.

f. Penentuan lokasi

⁸⁶ George R. Terry,, dan Leslie.W.Rue, *op.cit.*, hlm. 69.

⁸⁷ Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm. 11.

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas tindakan. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya dari segi untung ruginya, sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan, waktu, tenaga, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan suatu usaha.

g. Biaya

Setiap kegiatan memerlukan biaya, kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai, akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu usaha.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia.

Gumur merumuskan *organizing* ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.⁸⁸ Sedangkan Fayol menyebutkan sebagai *to organize a bussiness is to provide it with everything useful to its fungsioning, raw materials, tools, capital, personal*.⁸⁹

Fayol melihat bahwa organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan modal dan personil (karyawan).

Baik Gumur maupun Fayol sama-sama melihat bahwa *organizing* merupakan pengelompokan orang-orang dan alat-alat ke dalam satu kesatuan kerja guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun mengenai wujud dari pelaksanaan *organizing* adalah tampaknya kesatuan yang

⁸⁸ Alex Gumur, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, 1975, hlm. 23.

⁸⁹ Henry Fayol, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985, hlm. 53.

utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisasi yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terlihat adanya tiga unsur *organizing* yaitu:

- a. Pengenalan dan pengelompokan kerja
- b. Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.
- c. Pengaturan hubungan kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pengorganisasian sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.⁹⁰

Pelaksanaan suatu kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran, apabila diawali dengan perencanaan yang diikuti dengan pengorganisasian. Oleh karena itu, pengorganisasian memegang peranan penting bagi proses suatu kegiatan usaha. Sebab dengan pengorganisasian, rencana suatu kegiatan usaha akan lebih mudah pelaksanaannya, mudah pengaturannya bahkan pendistribusian tenaga kerja dapat lebih mudah pengaturannya. Hal ini didasarkan pada adanya pengamalan dan pengelompokan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan kerja kepada masing-masing pelaksana suatu kegiatan usaha.

3. Fungsi Penggerakan

Pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁹¹ Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya

⁹⁰ Mahmuddin, *op.cit.*, hlm. 32.

⁹¹ M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm.

dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (*actuating*)

Inti kegiatan penggerakan adalah bagaimana menyadarkan anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain.⁹² Menurut SP. Siagian bahwa suatu organisasi hanya bisa hidup apabila di dalamnya terdapat para anggota yang rela dan mau bekerja-sama satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih terjamin apabila para anggota organisasi dengan sadar dan atas dasar keinsyafannya yang mendalam bahwa tujuan pribadi mereka akan tercapai melalui jalur pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran merupakan tujuan dari seluruh kegiatan penggerakan yang metode atau caranya harus berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima oleh masyarakat.⁹³

Kesadaran yang muncul dari anggota organisasi terutama kaitannya dengan proses suatu kegiatan usaha, maka dengan sendirinya telah melaksanakan fungsi manajemen. Penggerakan merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian, setelah seluruh tindakan dipilah-pilah menurut bidang tugas masing-masing, maka selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan. Tindakan pimpinan dalam menggerakkan anggotanya dalam melakukan suatu kegiatan, maka hal itu termasuk *actuating*.

Unsur yang sangat penting dalam kegiatan penggerakan setelah unsur manusia, sebab manusia terkait dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, di dalam memilih anggota suatu organisasi dan dalam meraih sukses besar, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan orang-orang yang cakap. Dengan mendapatkan orang-orang yang cakap berarti akan memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha.

⁹² Mahmuddin, *op.cit.*, hlm. 36.

⁹³ SP. Siagian., *op.cit.*, hlm. 80.

Tindakan untuk menggerakkan manusia oleh Panglaykim disebut dengan *leadership* (kepemimpinan), perintah, instruksi, *communication* (hubung menghubungi), *conseling* (nasihat).⁹⁴

4. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekanan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.⁹⁵

Pengertian pengawasan dan evaluasi menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.⁹⁶

Pengawasan yang dilakukan sering disalah artikan untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal sesungguhnya pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan program yang telah digariskan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.

⁹⁴ Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 39 – 40.

⁹⁵ **DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit., hlm. 543**

⁹⁶ **Abdul Arifin Rahman, Kerangka Pokok-Pokok Management Umum. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, h. 99.**

3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.⁹⁷

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahiq. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan.

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

1. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
2. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

⁹⁷ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 171.

⁹⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁹⁹

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

1. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
2. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.¹⁰⁰

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat,

⁹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169

¹⁰⁰ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, h. 51.

pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.¹⁰¹

Pembahasan mengenai pengertian distribusi, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.¹⁰² Secara etimologi “distribusi” berasal dari bahasa Inggris *distribution* berarti penyaluran, pembagian.¹⁰³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁰⁴

Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*).¹⁰⁵ Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.¹⁰⁶ Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idris, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke

¹⁰¹ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 149

¹⁰² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 119.

¹⁰³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 190.

¹⁰⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 270.

¹⁰⁵ Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 162.

¹⁰⁶ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012, h. 171.

beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.¹⁰⁷ Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.¹⁰⁸ Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.¹⁰⁹

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:¹¹⁰

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan

¹⁰⁷ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 130.

¹⁰⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.177.

¹⁰⁹ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 128.

¹¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 234.

kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *masalahah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.¹¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini”.¹¹² Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.¹¹³

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.¹¹⁴ Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka

¹¹¹ *Ibid.*, h. 235.

¹¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 201.

¹¹³ Heri Sudarsono, *Konsep...*, h. 234

¹¹⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 115.

bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.¹¹⁵

D. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹¹⁶

Kata "tujuan" erat kaitannya dengan satu istilah dalam ushul fiqh yaitu kata "*maqasid al-syari'ah*". *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip Satria Effendi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu

¹¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan...*, h. 120

¹¹⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 240 – 242.

kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).¹¹⁷

Dalam ilmu usul fikih, bahasan *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Ulama usul fikih mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-syari'ah* di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, disyariatkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman kisas untuk memelihara jiwa seseorang.¹¹⁸

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqasid al-syari'ah*.¹¹⁹

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan

¹¹⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 233.

¹¹⁸Abdual Aziz Dahlan, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1108.

¹¹⁹Fahurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014, h. 12.

zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹²⁰ Di antara hikmahnya antara lain:

Pertama, sebagai manifestasi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. (إبراهيم: 7)

Artinya: "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7)¹²¹

Kedua, dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.¹²²

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,

¹²⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 82.

¹²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 114.

¹²² Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 449.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. (النساء: 37)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisaa' : 37).¹²³

Ketiga, membantu para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.¹²⁴

Di samping sebagai pilar amâl bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah: 2.

Keempat, membantu sarana dan prasarana yang diperlukan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.¹²⁵

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267

¹²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 114

¹²⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 180.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 318

Keenam, merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (ekonomi dengan hak kekayaan).¹²⁶ Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.¹²⁷ Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.¹²⁸ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Hasyr: 7.

Ketujuh, mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya Juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah maaliyyah al-ijtima'iyyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹²⁹

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lain-lainnya, namun amat besar pula hikmah

¹²⁶ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang:: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 2018, h. 99.

¹²⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 88.

¹²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 75.

¹²⁹ **Mohammad Daud Ali**, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia.

Al-Qur'an Surar At-Taubah: 103 yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW memungut zakat harta orang-orang kaya menyebutkan juga hikmahnya yaitu untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir. tetapi juga menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya. Jika dikembangkan atas barakah Allah. Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 39 mengajarkan bahwa orang-orang yang membayarkan zakat hartanya karena Allah adalah orang-orang yang melipatgandakan harta kekayaannya.

Ditinjau dari segi harta yang dibayarkan zakatnya, zakat berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. Dengan demikian, jika zakat tidak dibayarkan ini berarti bahwa harta orang kaya itu dikotori oleh hak orang lain yang belum dibayarkan. Akan tetapi jangan lain diartikan bahwa zakat adalah harta kotor sebab jika tidak demikian halnya orang yang berhak menerima zakat menjadi tempat pembuangan harta kotor.

Di pihak orang-orang yang berhak menerima zakat, kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati kaum fakir-miskin terhadap kaum kaya. Dengan adanya kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib solidier terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya.

Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Pada periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2004-2010. Pada periode ketiga ini, yakni tahun 2010-2013 kembali Wakil Walikota Semarang

Hendrar Prihadi SE, MM menjabat sebagai ketua BAZ. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.240, tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010.¹³⁰

Seiring berjalannya waktu BAZ Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya

¹³⁰ <http://bazsemarang.or.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

2. Visi Misi BAZNAS Kota Semarang

a. Visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

b. Misi

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS
2. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah
3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhu'afa*)

c. Moto

Pengelola zakat selain memiliki visi dan misi, juga mempunyai moto. Moto dari BAZNAS Kota Semarang adalah “*Meneguhkan Hati, Mengikhlaskan Amal, Berbagi Sesama*”.¹³¹

3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZNAS Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada BAZNAS Kota Semarang. Selain itu mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat kaum

¹³¹ <http://seputarsemarang.com/badan-amil-zakat/> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Susunan Pengurus BAZNAS Kota Semarang Sesuai SK Walikota Semarang No. 4551.12/502.¹³²

a. Dewan pertimbangan

- 1) Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM
- 2) Wakil ketua : Drs. H. Taufik Rahman, SH.,M.Hum
- 3) Sekretaris : Ir. Kukrit Suryo Wicaksono
- 4) Anggota : Drs. KH. Hadlor Ichsan
Dr. Yusuf Suyono, MA
H. Mustain
Drs. H. Hasan Toha Putra
Dr. Ir. Edi Nursasongko, M. Kom

b. Komisi pengawas

- 1) Ketua : Drs. H. Jasiruddin, SH., MM
- 2) Wakil ketua : H.B Priyono, SH, MM
- 3) Sekretaris : Drs. H. Akhmat Zaenuri, MM
- 4) Wakil sekretaris : Rahmulyo Adi Wibowo, SH, MH
- 5) Anggota : H. Mahfudz Ali, SH., M.Si
Drs. KH. Dzikron Abdillah
H. Azhar Wibowo, SH.,M.Pd.I

c. Badan pelaksana

- 1) Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM
- 2) Wakil Ketua I : Prof. Dr. H. Muhibbin, MA
- 3) Wakil Ketua II : H. Supriyadi, S.Sos
- 4) Sekretaris : Dra. Chuwaisoh
- 5) Wakil Sekretaris I : Drs. H. Bambang Indriyatmo, M.Si
- 6) Wakil Sekretaris II : Imam Sucahyo, SE

¹³² <http://baznas.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

7) Bendahara : Djody Aryo Setiawan, SE., Akt d.

d. Sie

1) Pengumpulan : Drs. Agung Hardjito, MM

H.Ahmad Tohari, BA

Drs. Bunyamin, M. Pd

Ir. Devri Alviandy, MM

M. Waluyo Sejati, SH., MM

Bambang Sutrisno, SE

Muhtadin, S.HI

2) Pendistribusian : H. Syamsudin, S.Ag.,

MH H.Adri Wibowo, S.H., MM

H.Much. Sapari, S. Ag.,M.Pd.I

Much. Nuh, BA

Wahyudi

Hj. Siti Rochayah

3) Pendayagunaan : Dra. Hj. Ayu Entys W LES, MM

Arnaz Agung Andrarasmara, MM

Dr. H. Ali Imron, M. Ag

Zumroni, S. HI

Tri Mursito, A.Md

4) Pengembangan : Dr. Imam Yahya, M. Ag

Imron Rosyadi, S.Pd.I

Farhan Hilmie, S.Sos.I

M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.SI

Muhammad Busro, S.Pd.I

Muhammad Asyhar, S.Sos.I

5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang, terletak di tempat yang strategis, berada di tengah kota

Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas-batas wilayah BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:¹³³

Utara : SD Al-Azhar

Timur : Gudang

Selatan : Pengadilan Tipikor

Barat : SD N Kalibanteng Kidul

6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang

a. Semarang Taqwa

1) Tebar Qur'an

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an

2) Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla.

3) Gempita Ramadhan

Merupakan program rutin BAZ Kota Semarang setiap bulan suci Ramadhan. BAZ Kota Semarang melibatkan seluruh UPZ untuk melakukan aksi sosial secara massal dengan memberikan bantuan sesuai yang direkomendasikan.

4) PHBI

Merupakan program peringatan rutin hari besar Islam BAZ Kota Semarang yang bertujuan sebagai media silaturahmi antara amil, muzakki dan mustahiq serta dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

b. Semarang Sehat

1) Layanan Kesehatan untuk Kaum Dhuafa

¹³³ <http://www.bazsemarang.or.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019

Merupakan program layanan kesehatan kepada *mustahiq* di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat, mobil ambulan dll.

c. Semarang Cerdas

1) Beasiswa Peduli Mahasiswa

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2) Pelajar & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

3) Bantuan Pendidikan

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship

d. Semarang Makmur

1) Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahiq*) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalan potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Bina mitra mandiri ini diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem Qardhul Hasan dan Mudharabah sesuai dengan mekanisme yang ada.

2) Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahiq) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

e. Semarang Peduli

1) Bantuan Sosial Langsung

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang Sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada Ibnu Sabil, masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob dan tanah longsor dan bedah rumah warga miskin.¹³⁴

B. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

Standar pengelolaan yang sudah diterapkan di BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:¹³⁵

1. Setiap awal tahun, BAZNAS menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya.
2. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Kota Semarang menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
3. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam mengembangkan teknis operasional tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang sudah dibuat.
4. Hasil pengumpul zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kota Semarang dan dilaporkan berkala kepada muzakki serta memberikan

¹³⁴ Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.

¹³⁵ *Ibid.*,

laporan tahunan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang.

5. BAZNAS Kota Semarang menerima, memonitoring, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpul zakat di bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.
6. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS Kota Semarang menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja.
7. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun yang bersangkutan, untuk disusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
8. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Kota Semarang menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.
9. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

Pada BAZ Kota Semarang sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni menumbuhkan kepercayaan *muzakki* agar mempercayakan zakatnya untuk disalurkan kepada BAZ Kota Semarang, dan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Semarang. Dalam penerapannya, BAZ Kota Semarang sudah mencapai salah satu tujuan yang diinginkan melalui program Beasiswa Produktif (Bespro), para mahasiswa yang diberikan zakatnya berupa beasiswa produktif selama satu tahun, kemudian saat mereka sudah lulus kuliah dan bekerja, mereka memberikan zakatnya melalui BAZ Kota Semarang. Hal

tersebut berarti telah mengubah mahasiswa yang awalnya sebagai *mustahiq*, kemudian setelah mereka mempunyai pekerjaan berganti menjadi *muzakki*. Namun untuk program-program yang lainnya belum terlihat perubahan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Untuk mencapai tujuan dalam mendistribusikan zakat, BAZ Kota Semarang sudah menyusun strategi dengan matang, diantaranya:

- a. Pendistribusian (pentasyarufan) setiap bulan.
- b. Pendistribusian (pentasyarufan) massal.
- c. Pendistribusian zakat produktif.
- d. Pendistribusian zakat untuk program insidental.
- e. Mengadakan pembenahan di intern BAZ Kota Semarang yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

BAZ Kota Semarang memiliki panca program pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Semarang Cerdas.
- b. Semarang Makmur.
- c. Semarang Peduli.
- d. Semarang Sehat.
- e. Semarang Taqwa.

Panca program tersebut sudah meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan diimplementasikan dalam program Semarang Cerdas, bidang perekonomian diimplementasikan dalam program Semarang Makmur, bidang sosial diimplementasikan dalam program Semarang Peduli, bidang kesehatan diimplementasikan dalam program Semarang Sehat, dan bidang keagamaan diimplementasikan dalam program Semarang Taqwa.

BAZ Kota Semarang sudah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti gedung sekretariat, kendaraan, fasilitas kerja, tinggal bagaimana para pengurus BAZ menggunakannya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai amil zakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai syari'at dan undang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagai amil zakat, BAZ Kota Semarang sudah melaksanakannya dengan efisien karena di awal tahun para pengurus sudah memiliki program kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun, dan pada akhir tahun akan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dan sesuai dengan standar pengelolaan zakat yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Semarang tidak efektif, hal ini dikarenakan adanya program pemberdayaan yatim dan dhuafa melalui unit yang berakhir dengan ditutupnya unit usaha servis HP yang dikarenakan keterbatasan SDM pengelola dalam menjalankan usahanya dan ketidakseriusan penanggungjawab dalam membina, mengelola dan meningkatkan jalannya program unit usaha. Kemudian masih sedikitnya *mustahik* penerima bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang memberikan infaknya kepada BAZ Kota Semarang. Tidak efektifnya program Bina Mitra Mandiri dikarenakan pemberian bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang diberikan kepada mereka yang sudah mampu, dan sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga alangkah lebih efektif jika pemberian bantuan dana *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap/pengangguran. Jadi bisa diketahui tingkat keefektifan pendistribusian zakat untuk mencapai tujuan BAZ Kota Semarang untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kota Semarang.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZNAS Kota Semarang

Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal tentunya harus ada hal-hal yang harus dipenuhi. Hal-hal tersebut ada kalanya harus dipenuhi sebelum suatu program dijalankan dan juga sesudah program tersebut dijalankan, itulah yang disebut dengan mekanisme. Mekanisme dalam hal ini adalah cara-cara yang dipakai dalam melakukan penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya sehingga diperoleh kepastian standar

bagi manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya. Kegiatan utama dari BAZNAS Kota Semarang adalah menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari'ah Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan lainnya. Oleh karena sumber dana tersebut merupakan dana amanah yang dipercayakan oleh dermawan, maka dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai program pemberdayaan mustahiq yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

1. Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:¹³⁶

a. Analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak

Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi calon penerima program sentra usaha ternak kambing. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua ini dimaksudkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pemberian bantuan binatang ternak

Tahap kedua ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang setelah tahap survei sukses dilaksanakan. Selain itu sebagai penyempurnaan mustahiq juga harus memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Kriteria tersebut adalah:

¹³⁶ Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.,

1) Beragama Islam

Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini.

2) Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin

Kriteria ini dimaksudkan agar setelah menerima program ini mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

3) Warga Kota Semarang

Selain warga Kota Semarang tidak berhak menerima program ini, program ini hanya untuk warga Semarang.

4) Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mekanisme awal dari pelaksanaan program ini adalah survei lokasi oleh BAZNAS Kota Semarang. Jadi apabila tempat yang dimaksudkan tidak sesuai dengan hasil survei, maka bantuan tidak jadi diberikan.

c. Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS Kota Semarang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS Kota Semarang kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahiq penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahiq yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

d. Monitoring atau pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahiq. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahiq bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak mustahiq bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan

yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.

2. Mekanisme pelaksanaan program bina mitra mandiri

Bina mitra mandiri adalah program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Semarang yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS Kota Semarang sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan pinjaman program bina mitra mandiri adalah sebagai berikut:¹³⁷

- a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
- b. BAZNAS Kota Semarang melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan
- c. BAZNAS Kota Semarang melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal
- d. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Semarang untuk mencairkan dana.

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti memberikan bantuan kepada korban tabrak lari, rumah roboh, kebakaran rumah, dll. Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi

¹³⁷ Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.

pinjaman modal. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahiq* dahulu.

Pendistribusian secara produktif adalah penyaluran yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari fungsi zakat hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan sudah lanjut usia, atau karena cacat. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak, serta apakah yang akan diberi itu benar-benar orang yang membutuhkan atau tidak. Selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai ataukah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga berupa pemberian ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahiq*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha dan pemberian hewan ternak, amil zakat atau *muzakki* harus bisa

tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Amil zakat dan *muzakki* juga harus tahu keadaan hewan ternak yang diberikan untuk *mustahiq*, apakah sudah berkembang dengan baik atau mengalami kendala dalam merawatnya. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZ ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan untuk dana operasionalnya diambilkan dari bagian amil zakat.

Zakat adalah salah satu komponen utama dalam system ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalahan sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai social control zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, ia menjadikan harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Begitu bermanfaatnya zakat sehingga Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Permasalahan zakat yang dihadapi saat ini sangat kompleks, dari mulai masih adanya sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, distribusi zakat yang belum tertata rapi hingga permasalahan fiqh tentang pengembangan dan ijtihad bagi model-model zakat produktif. Permasalahan terakhir inilah yang menjadi pembahasan makalah ini. Zakat produktif adalah menjadikan uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat. Dengan modal usaha ini diharapkan mustahiq zakat suatu saat akan menjadi seseorang muzaki.

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multidimensi bagi bangsa ini, untuk

mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka.

Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzaki zakat.

Zakat bagi usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk memanager distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai.

Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Tabel 3.1: Mustahiq Yang Dapat Memperoleh Zakat Produktif

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Ket.
1	Fakir	√	√	
2	Miskin	√	√	
3	Amil	√	√	
4	muallaf	-	√	
5	Riqab	-	√	
6	Gharimin	-	√	
7	Ibnu sabil	-	√	
8	Fi sabilillah	-	√	

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin serta amil menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif didasarkan pada penerimaan zakat yang secara global dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2: Penerimaan Global Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang

Tahun	Besarnya Penerimaan Zakat	Program Kegiatan Produktif 40%
2016	3.000.000000	120.000.000
2017	4000.000000	160.000.000
2018	6000.000000	240.000.000

Pada tabel di atas terlihat bahwa penerimaan zakat Baznas Kota Semarang dari tahun ke tahun meningkat, demikian pula penyaluran untuk program kegiatan produktif, dari tahun ke tahun meningkat.

BAB IV
ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BAZNAS KOTA SEMARANG

D. Analisis Kebijakan BAZNAS untuk Penyaluran Zakat Produktif

Kebijakan BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif masih belum sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan kata lain, di sana sini masih terdapat kekurangan. Kebijakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang masih belum sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen modern yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, utamanya fungsi pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa kebijakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang belum menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi pengawasan dan evaluasi. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Semarang punya pekerjaan lain sehingga tidak fokus dan belum maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi.

Kebijakan BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif harus sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan harapan semua pihak. Karena di sana sini masih terdapat kekurangan, terutama kebijakan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Namun demikian, pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya seharusnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-

produktif, seperti memberikan bantuan kepada korban tabrak lari, rumah roboh, kebakaran rumah, dll. Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya mengidentifikasi *mustahiq* dahulu.

Dalam mendistribusikan zakat di BAZ Kota Semarang adalah dengan “metode prioritas” yaitu mengutamakan para *mustahik* yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta zakat yang ada dan terkumpul di BAZ. Menurut peneliti apa yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam mendistribusikan zakat telah sesuai dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Demikian pula dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di antara *mustahiq* zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat¹³⁸ serta para Muallaf.¹³⁹ Mereka ini harus dibina agar kelak kemudian bisa menjadi muzakki. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Tabel di bawah ini

¹³⁸ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950

¹³⁹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983

menjelaskan tentang distribusi/penyaluran mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif:

Tabel 4.1: Mustahiq Yang Dapat Memperoleh Zakat Produktif

No	Asnaf	Produktif	Ket.
1	Fakir	√	
2	Miskin	√	
3	Amil	√	

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir, miskin, dan amil menjadi mustahiq dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.

Adapun jumlah mustahiq (fakir, miskin dan amil) yang telah di blacklist tidak diberi pinjaman modal lagi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Fakir, Miskin, dan Amil yang Telah di Blacklist Tidak Diberi Pinjaman Modal Lagi Selama 3 Tahun Terakhir

No	Fakir, Miskin, dan Amil		
	2016	2017	2018
1	12 Orang	13 orang	16 orang

Sumber:¹⁴⁰

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat (muzakki) tersebut memenuhi syarat:

1. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka.
2. Islam. Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bpk Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang), 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.,

kafir bukan orang yang suci. 3. Baligh dan Berakal; 4. harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; 5. harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya; 6. harta yang dizakati adalah milik penuh; 7. kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan *qamariyah*; 8. harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; 9. harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.¹⁴¹

Kebijakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang seharusnya tepat guna, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari fungsi zakat hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan sudah lanjut usia, atau karena cacat. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak, serta apakah yang akan diberi itu benar-benar orang yang membutuhkan atau tidak. Selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahik*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai ataukah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga berupa pemberian ketrampilan. Apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahik*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan baik.

¹⁴¹Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 2000, h. 1797.

Kebijakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang seharusnya sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: Pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas.

Pasal 3 menegaskan: Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Daerah yang dicakup BAZNAS adalah “Satu Kota Semarang”. Bentuk-bentuk Zakat produktifnya : dari program Semarang Makmur, yaitu : Bina Mitra Mandiri, Sentra Ternak, Beasiswa mahasiswa produktif. Tetapi yang lebih banyak diteliti itu adalah bagian ekonominya, jadi lebih ke bina mitra mandiri dan sentra ternak. Terkait dengan kebijakan penyaluran zakat produktif, menarik apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) sebagai berikut:

“Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa program pemberdayaan mustahiq yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri”.

Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

3. Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:¹⁴²

a. Analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak

Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi calon penerima program sentra usaha ternak kambing.

Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang

¹⁴² Wawancara dengan Bpk Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang), 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.

bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan program ini diberikan. Semua ini dimaksudkan agar kebijakan program ini dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pemberian bantuan binatang ternak

Tahap kedua ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang setelah tahap survei sukses dilaksanakan. Selain itu sebagai penyempurnaan mustahiq juga harus memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Kriteria tersebut adalah:¹⁴³

1) Beragama Islam

Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini.

2) Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin

Kriteria ini dimaksudkan agar setelah menerima program ini mustahiq tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

3) Warga Kota Semarang

Selain warga Kota Semarang tidak berhak menerima program ini, program ini hanya untuk warga Semarang.

4) Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mekanisme awal dari pelaksanaan program ini adalah survei lokasi oleh BAZNAS Kota Semarang. Jadi apabila tempat yang dimaksudkan tidak sesuai dengan hasil survei, maka bantuan tidak jadi diberikan.

c. Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS Kota Semarang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS Kota Semarang

¹⁴³ Wawancara dengan Bpk Ahmad Muhtadin (Pelaksana Bidang Pengumpulan), 1 April 2019.

kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahiq penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahiq yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

d. Monitoring atau pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahiq. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahiq bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak mustahiq bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.

4. Mekanisme pelaksanaan kebijakan program Bina Mitra Mandiri

Bina mitra mandiri adalah program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Semarang yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS Kota Semarang sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan pinjaman program Bina Mitra Mandiri adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

- e. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
- f. BAZNAS Kota Semarang melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bpk Wahyudi (Manajer Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan), 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.

- g. BAZNAS Kota Semarang melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal
- h. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Semarang untuk mencairkan dana.

Keterangan dari Bpk Syamsudin (Sie Pendistribusian):

“Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti memberikan bantuan kepada korban tabrak lari, rumah roboh, kebakaran rumah, dll. Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahiq* dahulu”.¹⁴⁵

Pendistribusian secara produktif adalah penyaluran yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari fungsi zakat hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan sudah lanjut usia, atau karena cacat. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bpk Syamsudin (Sie Pendistribusian), 2 April 2019.

kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak, serta apakah yang akan diberi itu benar-benar orang yang membutuhkan atau tidak. Selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai ataukah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga berupa pemberian ketrampilan. Apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahiq*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan sempurna.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.¹⁴⁶

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa

¹⁴⁶ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 171.

menjadi muzaki, bukan lagi mustahiq. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan.

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

3. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
4. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁴⁸

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

¹⁴⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2

¹⁴⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169

3. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
4. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.¹⁴⁹

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, h. 51.

¹⁵⁰ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 149

Pembahasan mengenai pengertian distribusi, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.¹⁵¹ Secara etimologi “distribusi” berasal dari bahasa Inggris *distribution* berarti penyaluran, pembagian.¹⁵² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁵³

Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*).¹⁵⁴ Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.¹⁵⁵ Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.¹⁵⁶ Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.¹⁵⁷ Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.¹⁵⁸

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen

¹⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 119.

¹⁵² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 190.

¹⁵³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 270.

¹⁵⁴ Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 162.

¹⁵⁵ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012, h. 171.

¹⁵⁶ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 130.

¹⁵⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.177.

¹⁵⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 128.

sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:¹⁵⁹

- d. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- e. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- f. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *masalah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.¹⁶⁰

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi

¹⁵⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 234.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 235.

Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini”.¹⁶¹ Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.¹⁶²

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.¹⁶³ Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mbumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.¹⁶⁴

¹⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 201.

¹⁶² Heri Sudarsono, *Konsep...*, h. 234

¹⁶³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 115.

¹⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan...*, h. 120

E. Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Semarang

Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan fungsi pengawasan dan evaluasi, dan baru sesuai dengan *planning*, *organizing*, dan *actuating*. Manajemen BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif masih belum sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan kata lain, di sana sini masih terdapat kekurangan. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang masih belum sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen modern yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, utamanya fungsi pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang belum menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi pengawasan dan evaluasi. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Semarang punya pekerjaan lain sehingga tidak fokus dan belum maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi.

Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Fungsi Perencanaan Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Ahmad Muhtadin (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan), ia menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

“Ditinjau dari segi *planning* (perencanaan), bahwa perencanaan penyalurannya: sosialisasi program, usulan dari masyarakat, masuk di bagian agenda, survei kelayakannya. Adapun kriterianya saat disurvei yaitu harus punya usaha, dan harus beragama Islam.

Kalaupun baru mau memulai usaha harus dikomunikasikan dengan jelas seperti: usaha apa yang akan dibentuk, berkisar biaya berapa, dan di mana letak usaha yang akan dimulai”.¹⁶⁵

Keterangan Bpk Ahmad Muhtadin diperkuat oleh Ibu Siti Rochayah (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan) sebagai berikut:

BAZNAS sifatnya “qordhul hasan” (pinjaman kebaikan) maka survei itu menentukan kelayakan mau diberi pinjaman berapa. Awal melakukan pinjaman di BAZNAS itu diberikan Rp. 1000.000 (1 juta) dengan biaya angsuran 100 ribu perbulan dan jika lancar saat ingin mengajukan pinjaman lagi dari pihak BAZNAS memperbolehkan dan jika usahanya berkembang maka mustahiq juga boleh naik pinjaman modalnya.¹⁶⁶

Berdasarkan keterangan dua informan tersebut di atas, perlu peneliti jelaskan bahwa setiap awal tahun, BAZNAS Kota Semarang menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaanya. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Kota Semarang menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam mengembangkan teknis operasional tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang sudah dibuat.

2. Fungsi Pelaksanaan, dan Pengoordinasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Hasil pengumpul zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kota Semarang dan dilaporkan berkala kepada muzakki serta memberikan laporan tahunan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bpk Tri Mursito (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan), 3 April 2019.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Rochayah (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan), 3 April 2019.

menerima, memonitoring, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpul zakat di bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS Kota Semarang menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun yang bersangkutan, untuk disusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Kota Semarang menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

Pada BAZ Kota Semarang sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni menumbuhkan kepercayaan *muzakki* agar mempercayakan zakatnya untuk disalurkan kepada BAZ Kota Semarang, dan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang. Dalam penerapannya, BAZ Kota Semarang sudah mencapai salah satu tujuan yang diinginkan melalui program Beasiswa Produktif (Bespro), para mahasiswa yang diberikan zakatnya berupa beasiswa produktif selama satu tahun, kemudian saat mereka sudah lulus kuliah dan bekerja, mereka memberikan zakatnya melalui BAZ Kota Semarang. Hal tersebut berarti telah mengubah mahasiswa yang awalnya sebagai *mustahiq*, kemudian setelah mereka mempunyai pekerjaan berganti

menjadi *muzakki*. Namun untuk program-program yang lainnya belum terlihat perubahan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Untuk mencapai tujuan dalam mendistribusikan zakat, BAZ Kota Semarang sudah menyusun strategi dengan matang, diantaranya:

- a. Pendistribusian (pentasyarufan) setiap bulan.
- b. Pendistribusian (pentasyarufan) massal.
- c. Pendistribusian zakat produktif.
- d. Pendistribusian zakat untuk program insidental.
- e. Mengadakan pembenahan di intern BAZ Kota Semarang yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen modern yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai pula dengan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

5. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.¹⁶⁷ Pada perencanaan terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya? Dalam *Kamus Besar*

¹⁶⁷Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 131.

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang.¹⁶⁸

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.¹⁶⁹

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat, ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran.

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- i. *Self-audit* (menentukan keadaan organisasi sekarang).
- j. *Survey terhadap* lingkungan
- k. Menentukan tujuan (objektives)
- l. *Forecasting* (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang)
- m. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- n. *Evaluate* (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan)
- o. Ubah dan sesuaikan "*revise and adjust*" rencana-rencana
sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang
berubah-ubah.
- p. *Communicate*, berhubungan terus selama proses
perencanaan.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 948.

¹⁶⁹ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 163.

¹⁷⁰ Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004, h. 24,

Rincian kegiatan perencanaan tersebut menggambarkan adanya persiapan dan antisipasi ke depan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Atas dasar itu maka perencanaan merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.¹⁷¹

Merencanakan di sini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Dengan demikian perencanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien bila diawali dengan persiapan yang matang. Sebab dengan pemikiran secara matang dapat dipertimbangkan kegiatan prioritas dan non prioritas, Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

h. Forecasting

Forecasting adalah tindakan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan kejadian yang mungkin timbul dan dihadapi di masa depan berdasarkan hasil analisa terhadap data dan keterangan-keterangan yang konkrit.¹⁷² Singkatnya *forecasting* adalah usaha untuk meramalkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa datang.¹⁷³ Perencanaan di masa datang memerlukan perkiraan dan perhitungan yang cermat sebab masa datang adalah suatu prakondisi yang belum dikenal dan penuh ketidakpastian yang selalu berubah-ubah. Dalam memikirkan perencanaan masa datang, jangan hanya hendaknya mengisi daftar keinginan belaka.

¹⁷¹ A.Rosyad Shaleh., *Management Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, h. 64.

¹⁷² *Ibid.*, h. 65.

¹⁷³ George R.Terry., dan Leslie.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara, 1988, h. 56.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam rangka *forecasting* diperlukan adanya kemampuan untuk lebih jeli di dalam memperhitungkan dan memperkirakan kondisi objektif suatu kegiatan di masa datang, terutama lingkungan yang mengitari kegiatan itu, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam kerangka *forecasting* ini, berbagai tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

7) Evaluasi keadaan

Hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan rencana yang lalu terwujud. Dari hasil telaah dan penelitian itu, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Dari situ dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan di masa datang.¹⁷⁴

8) Membuat Perkiraan-perkiraan

Langkah ini dilakukan berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan bertolak pada asumsi; kecenderungan masa lalu diproyeksikan pada masa yang akan datang, peristiwa yang terjadi berulang-ulang pada masa datang, menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Bertolak dari asumsi di atas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Pendekatan ekstrapolasi; yaitu perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.¹⁷⁵
- b) Pendekatan normatif; yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku.¹⁷⁶
- c) Pendekatan campuran.

9) Menetapkan sasaran/tujuan

10) Merumuskan berbagai alternatif

¹⁷⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 192.

¹⁷⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 222.

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 618.

11) Memilih dan menetapkan alternatif

12) Menetapkan rencana

i. Objectives

Objectives diartikan sebagai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan adalah nilai-nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai nilai-nilai itu dia bersedia memberikan pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu, terjangkau.¹⁷⁷

Penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan, dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua sesudah *forecasting*. Hal ini menjadi penting, sebab gerak langkah suatu kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi acuan pada setiap pelaksanaan kegiatan usaha.

Tujuan tersebut harus diarahkan pada sasaran suatu usaha yang telah dirumuskan secara pasti dan menjadi arah bagi segenap tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk target atau sasaran kongkrit yang diharapkan dapat dicapai.¹⁷⁸ Sasaran tersebut harus diperjelas secara jelas guna mengetahui kondisi sasaran yang diharapkan, wujud sasaran tersebut berbentuk individu maupun komunitas masyarakat.¹⁷⁹

j. Mencari berbagai tindakan

Tindakan harus relevan dengan sasaran dan tujuan, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang bijaksana. Tindakan harus sinkron dengan masyarakat, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

¹⁷⁷ Robert H. Davis, *Learning System Design*, New York: McGraw-Hill, Inc, 1974, h.

¹⁷⁸ Muchtarom, Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Al-Amin, 1997, h, 189-190.

¹⁷⁹ Didin Hafidhuddin..., h. 184 – 185.

Ketidaksinkronan dalam menentukan tindakan dapat menimbulkan dampak negatif.

Oleh karena itu jika sudah ditemukan berbagai alternatif tindakan, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh, dalam arti bahwa perencana harus memberikan penilaian terhadap kemungkinan tersebut. Pada tiap-tiap kemungkinan tersebut, harus diperhitungkan untung ruginya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan.

k. Prosedur kegiatan

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan.¹⁸⁰

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.

l. Penjadwalan (*Schedul*)

Schedul merupakan pembagian program (alternatif pilihan) menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses kegiatan suatu usaha. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi.¹⁸¹

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah ditentukan harus dapat ditepati, sebab menurut Drucker semakin banyak menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan merupakan pekerjaan profesional.

m. Penentuan lokasi

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas tindakan. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya dari segi untung ruginya, sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan, waktu, tenaga, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah

¹⁸⁰ George R. Terry, dan Leslie. W. Rue..., h. 69.

¹⁸¹ Sondang P. Siagian, ..., h. 11.

lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan suatu usaha.

n. Biaya

Setiap kegiatan memerlukan biaya, kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai, akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu usaha.

6. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia.

Gumur merumuskan *organizing* ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.¹⁸² Sedangkan Fayol menyebutkan sebagai *to organize a bussiness is to provide it with everything useful to its fungsioning, raw materials, tools, capital, personal*.¹⁸³

Fayol melihat bahwa organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan modal dan personil (karyawan).

Baik Gumur maupun Fayol sama-sama melihat bahwa *organizing* merupakan pengelompokan orang-orang dan alat-alat ke dalam satu kesatuan kerja guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun mengenai wujud dari pelaksanaan *organizing* adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisasi yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terlihat adanya tiga unsur *organizing* yaitu:

- d.** Pengenalan dan pengelompokan kerja
- e.** Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.

¹⁸² Alex Gumur, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, 1975, h. 23.

¹⁸³ Henry Fayol, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985, h. 53.

f. Pengaturan hubungan kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pengorganisasian sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.¹⁸⁴

Pelaksanaan suatu kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran, apabila diawali dengan perencanaan yang diikuti dengan pengorganisasian. Oleh karena itu, pengorganisasian memegang peranan penting bagi proses suatu kegiatan usaha. Sebab dengan pengorganisasian, rencana suatu kegiatan usaha akan lebih mudah pelaksanaannya, mudah pengaturannya bahkan pendistribusian tenaga kerja dapat lebih mudah pengaturannya. Hal ini didasarkan pada adanya pengamalan dan pengelompokan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan kerja kepada masing-masing pelaksana suatu kegiatan usaha.

7. Fungsi Penggerakan (*actuating*)

Pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.¹⁸⁵ Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (*actuating*)

¹⁸⁴ Mahmuddin, *Manajemen.....*, h. 32.

¹⁸⁵ M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h.

Inti kegiatan penggerakan adalah bagaimana menyadarkan anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain.¹⁸⁶ Menurut SP. Siagian bahwa suatu organisasi hanya bisa hidup apabila di dalamnya terdapat para anggota yang rela dan mau bekerja-sama satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih terjamin apabila para anggota organisasi dengan sadar dan atas dasar keinsyafannya yang mendalam bahwa tujuan pribadi mereka akan tercapai melalui jalur pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran merupakan tujuan dari seluruh kegiatan penggerakan yang metode atau caranya harus berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸⁷

Kesadaran yang muncul dari anggota organisasi terutama kaitannya dengan proses suatu kegiatan usaha, maka dengan sendirinya telah melaksanakan fungsi manajemen. Penggerakan merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian, setelah seluruh tindakan dipilah-pilah menurut bidang tugas masing-masing, maka selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan. Tindakan pimpinan dalam menggerakkan anggotanya dalam melakukan suatu kegiatan, maka hal itu termasuk *actuating*.

Unsur yang sangat penting dalam kegiatan penggerakan setelah unsur manusia, sebab manusia terkait dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, di dalam memilih anggota suatu organisasi dan dalam meraih sukses besar, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan orang-orang yang cakap. Dengan mendapatkan orang-orang yang cakap berarti akan memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha.

Tindakan untuk menggerakkan manusia oleh Panglaykim disebut dengan *leadership* (kepemimpinan), perintah, instruksi, *communication* (hubung menghubungi), *conseling* (nasihat).¹⁸⁸

8. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

¹⁸⁶ Mahmuddin, *Manajemen....*, h. 36.

¹⁸⁷ SP. Siagian....., h. 80.

¹⁸⁸ Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, h. 39 – 40.

Pengendalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.¹⁸⁹

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁹⁰

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sering disalah artikan untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal sesungguhnya pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan program yang telah digariskan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁸⁹ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 543

¹⁹⁰ Abdul Arifin Rahman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, h. 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati uraian dari bab pertama sampai bab kelima, dan sesuai dengan perumusan masalah, dapat diambil konklusi sebagai berikut:

1. Kebijakan BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan harapan semua pihak. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya seharusnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti memberikan bantuan kepada korban tabrak lari, rumah roboh, kebakaran rumah, dll. Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya mengidentifikasi *mustahiq* dahulu.
2. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan fungsi pengawasan dan evaluasi, dan baru sesuai dengan *planning*, *organizing*, dan *actuating*. Manajemen BAZNAS Kota Semarang untuk penyaluran zakat produktif masih belum sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Dengan kata lain, kebijakan BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan kata lain, di sana sini

masih terdapat kekurangan. Manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang masih belum sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen modern yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, utamanya fungsi pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa manajemen penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang belum menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi pengawasan dan evaluasi. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Semarang punya pekerjaan lain sehingga tidak fokus dan belum maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi.

B. Saran-Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Untuk Mustahiq Peminjam Modal

Mustahiq peminjam modal harus mampu menggunakan pinjaman itu sesuai dengan harapan BAZ Kota Semarang, dan menggunakan dengan tepat guna, efisien dan rasional

2. Untuk BAZNAS

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha dan pemberian hewan ternak, maka amil zakat atau *muzakki* harus bisa tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Amil zakat dan *muzakki* juga harus tahu keadaan hewan ternak yang diberikan untuk *mustahiq*, apakah sudah berkembang dengan baik atau mengalami kendala dalam merawatnya. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZ ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan untuk dana operasionalnya diambulkan dari bagian amil zakat.

3. Untuk Peneliti

Penelitian ini belum final, maka pada peneliti lain dapat menjadi masukan untuk lebih dalam lagi melakukan penelitian dengan pendekatan yang berbeda.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf, *Manajemen Berbasis Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Islam dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Hamid (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Al-Jamâl, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976.
- Al-Jaziry, Abdul al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tth.
- Al-Mâlîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2017.
- Al-San'âny, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950
- Al-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ansori, Teguh, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", (*Jurnal Muslim Heritage*), Vol. 3, No.1, 12 Mei 2018.

- Anwar Ahmad, Thoharul, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", (*Jurnal Zakat dan Wakaf*), Vol. 5, No. 1, 8 Juni 2018
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Asy Syaukânî, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, 2006, Yogyakarta: UII Press.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975.
- Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlanggha, 2010.
- Dahlan, Abdual Aziz, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Davis, Robert H., *Learning System Design*, New York: McGraw-Hill.Inc, 1974.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Fayol, Henry, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985.

Fitri, Maftul, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: (Jurnal Ekonomi Islam)* – Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173 ISSN: 2085-9325., 5 Juni 2017.

Fitriani, Widya Francisca & Anita Priantina, "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif", (*Jurnal Al-Muzara'ah*) Vol.4, No.2, 5 Oktober 2016 142 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363)

Gumur, Alex, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, 1975.

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

-----, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Islam dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

-----, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014.

Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Produktif dan Efektif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

<http://baznas.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

<http://bazsemarang.or.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

<http://seputarsemarang.com/badan-amil-zakat/> diakses pada tanggal 17 Maret 2019

<http://www.bazsemarang.or.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Isnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2.

Koontz, Harold, and Cyril O. Donnel, *Principles of Management, An Analysis of Managerial Functions*, Second Edition, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, Ltd, 1984.

Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004.

Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972.

Mas'udi, Masdar F. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014.

Moekiyat, *Kamus Management*, Bandung: Alumni, 1980.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Muchtarom, Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Al-Amin, 1997.

Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Munir, M., dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth.

Observasi di BAZNAS Kota Semarang tanggal 5 Maret 2019. Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang

Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Pas, Christopher, dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumaepa dan Posman Haloho, Jakarta: Erlanggah, 2010.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2013.
- Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2015.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Abdul Arifin, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976.
- Robbins, Stephen P., and Mary Coulter, *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang:: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 2018.
- Sartika, Mila, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, (*Jurnal Ekonomi Islam*), Vol. II, No. 1, 15 Juli 2018
- Setiawan, Andri, “Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat”, Skripsi: Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015
- Shaleh, A.Rosyad., *Management Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Siagian, Harbangan, *Manajemen Suatu Pengantar*, Semarang: Satya Wacana, 2013.
- Stoner, James A.F., dkk., *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Suparyogo, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.

- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014.
- Surjaman, Tjun (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syaifudin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Terry, George.R., *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977.
- , *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- , dan Leslie.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta:: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang) tanggal 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB
- Wawancara dengan Bpk Ahmad Muhtadin (Pelaksana Bidang Pengumpulan), 1 April 2019.
- Wawancara dengan Bpk Asyhar (Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang), 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.,
- Wawancara dengan Bpk Syamsudin (Sie Pendistribusian), 2 April 2019.
- Wawancara dengan Bpk Tri Mursito (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan), 3 April 2019.
- Wawancara dengan Bpk Wahyudi (Manajer Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), 27 Maret 2019 jam 10.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Rochayah (Pelaksana bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan), 3 April 2019.

Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 2014.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 2013.

Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth.

Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2012.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 1 dengan: Ketua Dewan Pertimbangan Baznas Kota Semarang

Nama Informan

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara

Lokasi Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa visi dan misinya?
4. Apa tujuan BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?
7. Apa saja bentuk-bentuk zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
8. Bagaimana manajemen perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana manajemen pengorganisasian pada BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana manajemen pergerakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
11. Bagaimana manajemen evaluasi dan pengawasan dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
12. Hambatan apa yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 2 dengan: Komisi Pengawas Baznas Kota Semarang

Nama Informan

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara

Lokasi Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa visi dan misinya?
4. Apa tujuan BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?
7. Apa saja bentuk-bentuk zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
8. Bagaimana manajemen perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana manajemen pengorganisasian pada BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana manajemen pergerakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
11. Bagaimana manajemen evaluasi dan pengawasan dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
12. Hambatan apa yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 3 dengan: Badan Pelaksana Baznas Kota Semarang

Nama Informan

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara

Lokasi Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa visi dan misinya?
4. Apa tujuan BAZNAS Kota Semarang?

5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?
7. Apa saja bentuk-bentuk zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
8. Bagaimana manajemen perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana manajemen pengorganisasian pada BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana manajemen pergerakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
11. Bagaimana manajemen evaluasi dan pengawasan dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
12. Hambatan apa yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 4 dengan: Seksi Pendistribusian BAZNAS Kota Semarang

Nama Informan

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara

Lokasi Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa visi dan misinya?
4. Apa tujuan BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?
7. Apa saja bentuk-bentuk zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
8. Bagaimana manajemen perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana manajemen pengorganisasian pada BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana manajemen pergerakan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?

11. Bagaimana manajemen evaluasi dan pengawasan dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
12. Hambatan apa yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif?

LAMPIRAN

Wawancara





Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Manejer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ira Nikmatul Maskuroh
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 November 1994
 NIM : 122411209
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Alamat : Jl Natuna RT. 025/ RW. 005 Kelurahan Hangtuah
 Kecamatan Perhentian Raja Kota Pekanbaru

Pendidikan :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. TK PGRI 99 Ngaliyan Semarang | Lulus Tahun 2000 |
| 2. SDN Bringin 01 Ngaliyan Semarang | Lulus Tahun 2006 |
| 3. MTS Futuhiyyah 02 Mranggen Demak | Lulus Tahun 2009 |
| 4. MA Futuhiyyah 02 Mranggen Demak | Lulus Tahun 2012 |
| 5. Masuk UIN Walisongo Semarang | Angkatan Tahun 2012 |

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Mei 2019

Ira Nikmatul Maskuroh
 122411209